



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 09 Februari 2021

Halaman: 1

RT Zona Merah Dikarantina

JOGJA—Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat mikro di DIY bakal dimulai Selasa (9/2) hari ini.

Lugas Subarkah, Abdul Hamid Razak,
& Catur Dwi Janati
redaksi@harianjogja.com

Dalam penerapannya, satu rukun tetangga (RT) yang masuk zona merah

▶ Kebutuhan pembiayaan pada posko di kalurahan dibebankan pada Dana Desa dan APB-Des.

▶ DIY menjadi daerah dengan proporsi lansia terbanyak di Indonesia.

akan diberlakukan pembatasan kegiatan, karantina atau *lockdown* lokal. Untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari akan disuplai oleh Satgas Covid Kalurahan.

Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji,

menuturkan dalam PPKM mikro dilakukan pemetaan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT. Zonasi terdiri dari empat zona, yakni zona hijau, kuning, oranye, dan merah. Warna zona menentukan tindakan yang harus diambil di setiap RT.

"Bagi RT yang tidak ada kasus positif maupun berinteraksi dengan kasus positif dalam satu pekan terakhir maka dinyatakan zona hijau. Tapi kalau ada kasus satu sampai lima



zona kuning, enam sampai sepuluh zona oranye dan lebih dari sepuluh zona merah," katanya, Senin (8/2).

Penentuan zonasi di setiap RT akan dihitung berdasarkan kondisi sepekan terakhir dan hanya pada kasus konfirmasi kasus positif, yang diajukan oleh RT ke pemkab/pemkot.

Hal ini berbeda dengan penghitungan zonasi di tingkat kecamatan sebelumnya, di mana penentuannya bukan hanya

berdasarkan hitungan konfirmasi positif melainkan 14 indikator.

Pada zona hijau, skenario pengendalian yakni dengan surveilans aktif, seluruh *suspect* dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan rutin berkala. Pada zona kuning, skenario pengendalian dengan menemukan kasus *suspect* dan pelacakan kontak erat, lalu isolasi mandiri untuk pasien positif, dan kontak erat dengan pengawasan ketat. (selengkapnya lihat grafis)

▶ Halaman 10

RT Zona...

Untuk pelaksanaan skenario pengendalian tersebut, setiap kelurahan dan kalurahan diwajibkan membentuk Posko Penanganan Covid-19, yang memiliki empat fungsi utama yakni pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan dan kalurahan.

Adapun kebutuhan pembiayaan pada posko di kalurahan dibebankan pada Dana Desa dan APBD-Des. Sementara untuk posko di kelurahan dibebankan pada APBD kabupaten/kota. Lalu untuk 3T yakni *testing, tracing* dan *treatment*, anggaran dibebankan pada APBD DIY dan kabupaten-kota.

Di samping PPKM mikro, penerapan PPKM juga dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, meliputi *work from home* (WFH) 50% untuk perkantoran, pembelajaran jarak jauh, kapasitas maksimal 50% untuk tempat makan, pembatasan jam operasional pukul 21.00 WIB untuk tempat perbelanjaan dan kapasitas maksimal 50% untuk tempat ibadah.

Sama dengan PPKM sebelumnya, tempat makan masih diperbolehkan buka lebih dari pukul 21.00 WIB khusus untuk pembelian yang dibawa pulang, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, menuturkan dengan PPKM diharapkan dapat mengontrol mobilitas masyarakat di tingkat RT. "Kalau tidak perlu tidak usah pergi. Seperti awal dulu, supaya turunnya [kasus positif] lebih besar. Untuk memotong penularan, karena sudah sampai keluarga dan tetangga," ujarnya.

Adapun untuk sanksi bagi pelanggaran PPKM mikro, Sultan menyerahkan pada pembik/pemkot untuk mengatur lebih detail. "Yang membuat bupati dan wali kota. Jadi perkara sanksi silakan saja bupati dan wali kota, karena kami hanya garis besar saja," ungkapnya.

Penerapan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro 9-22 Februari 2021 masih dimatangkan. Dengan kebijakan ini maka RT yang berstatus zona merah dapat dikurangkan atau dilockdown.

Kepala Dinas Kesehatan Sleman, Joko Hastaryo mengatakan saat ini Dinkes masih memetakan epidemiologi kasus Covid-19. Pemetaan dilakukan hingga tingkat RT. Data epidemiologi sampai level RT ini disiapkan untuk menindaklanjuti kebijakan PPKM mikro. Hanya saja, kata Joko, ada perbedaan yang ditentukan oleh Pusat dengan apa yang akan dilakukan oleh Pemkab.

"Kalau arahan dari pusat, RT zona merah jika jumlah kasus positif Covid-19 nya di atas 10 rumah, maka di Sleman berbeda. Kami akan memperkecil lingkup zonasi. Suatu RT dikategorikan zona merah, jika jumlah kasus positif Covid-19 yang ditemukan lebih dari 5 rumah," katanya.

la melanjutkan RT yang masuk zona merah akan diberlakukan pembatasan kegiatan, karantina

atau *lockdown* lokal. Selama berlangsung PPKM mikro, posko Covid-19 tingkat kalurahan dan kapanewon akan diefektifkan.

Dia berharap, PPKM Mikro akan semakin efektif untuk menekan kasus Covid-19. Sebab, katanya, PPKM pertama pada 11-25 Januari 2021 sudah mulai terlihat hasilnya. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah kasus baru Covid sejak 31 Januari.

"Jumlah kasus harian cenderung turun. Kalau biasanya di kisaran 100 bahkan sampai di atas 150. Namun sejak 31 Januari hingga 7 Februari, tambahan kasus turun menjadi kisaran 21-104 per hari. Angkanya tidak mengerikan lagi," katanya.

Kepala Social Development Studies Centre (SODEC) Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PsDK, Fisipol UGM), Himpri Suyatna, berpendapat sepanjang arus mobilitas penduduk tidak terkontrol secara baik, kebijakan PPKM mikro kemungkinan tidak akan efektif. Perlu adanya optimalisasi satuan tugas (satgas) penanganan Covid-19 sampai tingkat RT dan RW serta padukuhan.

Vaksinasi Lansia

Lansia menjadi kelompok masyarakat yang akan divaksinasi pada tahap kedua vaksinasi bersama petugas pelayanan publik. Vaksinasi untuk lansia dilakukan setelah vaksinasi tahap pertama pada tenaga kesehatan selesai dilakukan, yang ditargetkan pada akhir Februari mendatang.

DIY menjadi daerah dengan proporsi lansia terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2019, DIY memiliki proporsi penduduk lansia 14,5%. Jika pada tahun yang sama total terdapat 3.842.932 penduduk, jumlah lansia di DIY setidaknya sekitar 557.225 penduduk.

Jumlah ini lebih banyak dibandingkan jatah vaksinasi tahap kedua DIY pada pendataan awal dari Kementerian Kesehatan, yakni sebanyak 555.290 dosis. Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih, mengatakan lansia yang akan divaksin ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

"Nanti daerah melakukan verifikasi," katanya, Senin.

Dalam vaksinasi juga akan dilakukan proses *screening* kesehatan yang akan memastikan kondisi kesehatan penerima vaksin memungkinkan untuk divaksinasi. Di setiap puskesmas, kata dia, juga sudah memiliki data rekam medis lansia sehingga akan digunakan sebagai rujukan *screening*. "Setiap pelaksanaan vaksinasi ada prosedurnya. Ada empat meja yang harus dilalui.

Nah meja kedua adalah meja di mana peserta vaksinasi nanti dilakukan *screening* status kesehatannya," ujarnya.

Sultan HB X mengaku siap menerima vaksin Covid-19 seiring telah keluarnya izin penggunaan darurat vaksin buatan Sinovac, Coronavac, terhadap kelompok masyarakat berusia di atas 60

tahun. "Loh ya [terima] vaksin to," katanya.

la mengatakan saat rapat bersama Presiden Jokowi dan para gubernur, hanya dirinya yang belum mendapatkan vaksin karena belum ada vaksin Covid-19 untuk lansia. "Makanya kemarin waktu saya rapat dengan Presiden saya bilang dari semua yang hadir, saya sendiri yang belum divaksin," kata dia.

Oleh sebab itu, ia berharap, ketersediaan vaksin Covid-19 untuk lansia atau berusia 60 tahun ke atas, bisa lebih cepat. "Semoga lebih cepat lebih baik [ada vaksin untuk lansia]," ujarnya.

Kepala Dinkes Sleman, Joko Hastaryo, mengatakan vaksinasi Covid-19 kepada nakes lansia dilakukan mulai Selasa, hari ini. "Mulai besok pagi [hari ini] sudah bisa kami layani, di puskesmas sesuai wilayah tempat praktik masing-masing," ujar Joko.

Joko menjelaskan berdasarkan catatan dari Dinkes Sleman terdapat ratusan nakes yang masuk kategori lansia. "Nakes yang usia di atas 60 tahun [dan masih aktif] seperti ini tidak banyak, dan kami sudah ada datanya, yakni kurang lebih ada 150 orang," ujarnya.

Kepala Dinkes Jogja, Emma Rahmi menuturkan vaksinasi untuk lansia diprioritaskan ke nakes yang masuk kategori itu. Emma menambahkan 245 tenaga kesehatan lansia bakal menerima vaksinasi susulan.

Pasalnya vaksinasi bagi nakes telah dilakukan sejak Januari lalu kini beberapa di antaranya telah memasuki injeksi kedua. "Sementara itu dulu karena menyesuaikan jumlah vaksin yang diterima Dinkes Kota Jogja," ujarnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 18 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005